

Nagari Anduriang Pada Masa Pergolakan PRRI (1958-1961)

Zarina Rahmi^{1(*)}, Zul Asri²

^{1,2}Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

*zarinarahmi@gmail.com

Abstract

During the PRRI upheaval, the lives of the people of Nagari Anduriang were not much different from other villages in West Sumatra. People live in an atmosphere filled with fear, life is not safe, many people run to the jungle to hide. The life of the people of Nagari Anduriang looks very different when it is controlled by PRRI and APRI both in the social, economic and political fields. The purpose of this study was to determine the social, political and economic life of the people of Nagari Anduriang during the 1958-1961 PRRI upheaval. This research focuses more on the social, political and economic life of the people of Nagari Anduriang during the upheaval of the PRRI 1958-1961. The research method used is a historical research method that is through four stages including, the first stage is heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The results showed that the PRRI incident greatly affected various areas of the life of the people of Nagari Anduriang. First, the social life of the community, which initially lived in harmony, worked together, trusted each other, began to accuse and suspect each other. Second, in economic life, people began to experience difficulties in meeting their daily needs, because of the economic embargo policy. Third, in political life, the majority of the people who support the Masyumi Party fled to the forest because their safety was threatened.

Keywords: Social Life, Politics and Economy, PRRI, Nagari Anduriang.

Abstrak

Saat masa pergolakan PRRI, kehidupan masyarakat Nagari Anduriang tidak jauh berbeda dengan nagari-nagari lain yang ada di Sumatera Barat. Masyarakat hidup dalam suasana yang penuh dengan rasa takut, hidup tidak aman, masyarakat banyak yang lari ke rimba untuk bersembunyi. Kehidupan masyarakat Nagari Anduriang tampak sangat jelas berbeda ketika dikuasai oleh PRRI dan APRI baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat Nagari Anduriang pada masa pergolakan PRRI 1958-1961. Penelitian ini lebih berfokus pada kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat Nagari Anduriang pada masa pergolakan PRRI 1958-1961. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yaitu melalui empat tahap meliputi, tahap pertama yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa PRRI sangat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat Nagari Anduriang. *Pertama* kehidupan sosial masyarakat yang awalnya hidup rukun, bergotong royong, mempercayai satu sama lain berubah mulai saling tuduh dan mencurigai. *Kedua* kehidupan ekonomi, masyarakat mulai mengalami kesusahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena kebijakan embargo ekonomi. *Ketiga* kehidupan politik, masyarakat mayoritas pendukung Partai Masyumi banyak melarikan diri ke hutan karena keselamatan mereka terancam.

Kata Kunci: Kehidupan Sosial, Politik dan Ekonomi, PRRI, Nagari Anduriang.

PENDAHULUAN

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) lahir dari berbagai macam ketidakpuasaan terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Puncak permasalahan dari ketidakpuasaan daerah ialah pembacaan ultimatum Dewan Banteng oleh Ahmad Husein di Padang pada tanggal 10 Februari 1958. Ultimatum tersebut berisi tentang : 1) Menuntut dibubarkannya Kabinet Djuanda dalam tempo 5x24 jam serta mengembalikan mandat kepada presiden, 2) Mohammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX ditunjuk untuk membuat kabinet baru, 3) Kabinet baru diberikan kesempatan bekerja sampai diadakan pemilu, 4) Presiden Soekarno harus membatasi diri sesuai peraturan konstitusi, 5) Jika tuntutan tidak dipenuhi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka dewan perjuangan akan mengambil tindakan sendiri. Sehari setelah pembacaan ultimatum, Kabinet Djuanda mengadakan sidang darurat dan menghasilkan keputusan bahwa pemerintah secara tegas menolak ultimatum tersebut dan membebas tugaskan perwira-perwira militer yang mendukung aksi tersebut diantaranya adalah Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Djambek, Kolonel Ahmad Husein, Kolonel Mauluddin Simbolon, serta Memerintahkan Penangkapan (Zed, 1998, hlm 146-147).

Pada tanggal 15 Februari 1958, Dewan perjuangan mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), karena limit waktu ultimatum mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat. Ahmad Husein yang dibantu oleh tokoh-tokoh nasional seperti Sjafruddin Prawiranegara, M. Natsir, Burhanuddin Harahap dan Soemitro Joyohadikusumo membentuk pemerintahan tandingan dan menunjuk Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri yang berkedudukan di Padang. Berbagai usaha perundingan selalu gagal dan menemui jalan buntu, pemerintahan pusat mengambil langkah penyelesaian dengan menggunakan kekuatan militer yang bertujuan untuk mewujudkan normalisasi pemerintah. Angkatan Perang Republik Indonesia/APRI segera dipersiapkan untuk menumpas”Pemberontakan” (Zed, 1998, hlm 148-149). Pemberontakan ialah suatu perlawanan atau hal-hal yang bersifat menantang terhadap sesuatu yang dianggap telah menyimpang dari peraturan yang ada (Zuraida, 2013. hlm 3). Secara etimologis pemberontakan merupakan penggulingan atau pemerintahan yang sah dengan cara kekerasan (Soekanto, 1985. hlm 416). Secara operasional pemberontakan merupakan suatu wujud tindakan untuk melawan penguasa dengan kekerasan fisik dan dapat berupa perlawanan bersenjata, yang mana tujuannya untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah yang disebabkan oleh rasa frustrasi dan ketidakpuasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia (Djopari, 1993. hlm 16).

Pemerintah di bawah pimpinan Jendral Ahmad Yani melancarkan sebuah operasi militer yang dikenal dengan Operasi 17 Agustus, yang bertujuan untuk menumpas pemberontakan PRRI (Nuryanti, 2011). Pada tanggal 17 April 1958 pada bulan Ramadhan Operasi-operasi militer dimulai, pengeboman dari laut dan udara menggegerkan dan meluluhlantakan kota Padang. Peristiwa ini menurut Iim Imaduddin merupakan perang yang paling besar ditahun 1950-an, dilihat dari segi wilayah, waktu, serta dampak yang ditimbulkan setelah perang (Immadudin, 2002). Nagari Anduriang sebagai bagian dari

wilayah Sumatera Barat yang terletak di kabupaten Padang Pariaman juga tidak lepas dari gaung gerakan PRRI, setelah pasukan utama PRRI menderita kekalahan di kota-kota, kekuatan militer PRRI dari kota Pariaman yang terdesak oleh gempuran operasi militer pusat, menjadikan Nagari Kayu Tanam sebagai tempat untuk melanjutkan aktivitas mereka. Nagari Kayu Tanam dipilih karena dianggap strategis oleh prajurit PRRI dan merupakan jalan satu-satunya menuju daerah Padang Panjang dari arah Padang. PRRI tidak hanya melanjutkan aktivitas mereka di kawasan Kayutanam saja, di samping Kayu Tanam PRRI melanjutkan perjuangan di Nagari Anduriang dan menjadikan basis pertahanan untuk bergerilya.

Dijadikannya Nagari Anduriang sebagai tempat untuk melanjutkan perjuangan pasukan PRRI tidak terlepas dari beberapa faktor, 1) Nagari Anduriang merupakan daerah yang juga dianggap strategis oleh prajurit PRRI karena merupakan daerah yang memiliki jarak cukup dekat dengan Kayu Tanam yang merupakan jalan satu-satunya menuju daerah Padang Panjang dari arah Padang. 2) Kondisi topografi Nagari Anduriang yang dibatasi oleh sungai Batang Anai dan bukit barisan yang dapat di jadikan sebagai benteng dan untuk melakukan perlawanan pasukan PRRI pada saat perang. 3) Keadaan sosial, ekonomi dan politik masyarakat Nagari Anduriang juga merupakan faktor yang menjadikan Nagari Anduriang dijadikan sebagai tempat untuk melanjutkan perlawanan terhadap pemerintahan pusat. Hal ini menjadikan Nagari Anduriang sebagai salah satu daerah pertahanan prajurit PRRI(Inyiah Muih, 2020). Kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu pertama,, penelitian dari Putri Syafriani (2014) yang berjudul Nagari Kayutanam pada masa PRRI (1958-1961). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu membahas tentang bagaimana kehidupan masyarakat Nagari Kayutanam pada masa pergolakan dan pasca terjadinya peristiwa PRRI, sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat Nagari Anduriang pada masa pergolakan PRRI.

Kedua, penelitian Odrian WD Putra (2019) yang berjudul Nagari Matur pada masa PRRI (1958-1961). Penelitian ini membahas tentang kehidupan masyarakat Matur pada masa PRRI serta peranan Matur pada masa pergolakan daerah, sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat Nagari Anduriang pada masa pergolakan PRRI 1958-1961. *Ketiga* Penelitian Hera Hastuti (2010) yang berjudul Nagari Paninggahan pada masa PRRI (1958-1961). Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peranan Nagari Paninggahan pada masa pergolakan PRRI dimana letak wilayah yang strategis, tekstur nagari yang dipagari oleh hutan-hutan yang menjadikan Nagari Paninggahan sangat penting dalam masa PRRI, sedangkan peneliti lebih mengkaji tentang bagaimana kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat Nagari Anduriang pada masa pergolakan PRRI 1958-1961. *Keempat* buku karya R.Z, Leirissa yang berjudul *PRRI-Permesta; Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis (1997)*. Buku ini mendeskripsikan bagaimana persepsi para eksponen PRRI-Permesta mengenai tanah air pada tahun 1950-an. Pokok penting yang terdapat dalam buku ini adalah bagaimana

upaya para eksponen PRRI-Permesta dalam menyusun strategi pembangunan berskala nasional, tanpa keterlibatan PKI dalam kegiatan politik nasional.

Pentingnya penelitian ini ialah *pertama* menarik karena Nagari Anduriang ini merupakan salah satu basis pertahanan PRRI terhadap pemerintahan pusat, *kedua* ada 2 kelompok yang bersaing yang menyebabkan munculnya masalah sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat di Nagari Anduriang, *ketiga* peristiwa PRRI di Nagari Anduriang belum ada yang meneliti padahal daerah ini merupakan daerah yang cukup lama bertahan pada masa PRRI 1958-1961. Penelitian ini lebih berfokus pada kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat Nagari Anduriang pada masa Pergolakan PRRI (1958-1961). Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat Nagari Anduriang pada masa pergolakan PRRI 1958-1961. Manfaat penelitian ini ialah untuk memberikan tambahan pengetahuan sejarah di daerah, khususnya tentang sejarah peristiwa Pergolakan PRRI di Nagari Anduriang, manfaat yang lainnya ialah untuk memberikan tambahan pengetahuan mengenai kondisi sosial, ekonomi dan politik pada masa Pergolakan PRRI di Nagari Anduriang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah terdiri dari empat tahap kegiatan, yaitu *heuristik* (mengumpulkan sumber), *kritik sumber*, *interpretasi* dan *historiografi* (Louis Gottschalk, 1975, hlm 32). Tahap *pertama*, Heuristik adalah teknik mengumpulkan data, baik data itu secara tertulis maupun tidak tertulis (secara lisan). Data secara tertulis bisa kita dapatkan melalui studi kepustakaan yang penulis lakukan di berbagai perpustakaan, seperti perpustakaan pusat Universitas Negeri Padang, perpustakaan fakultas ilmu sosial, ruang baca jurusan sejarah, dan jurnal. Pada penelitian ini juga diperoleh buku-buku dan arsip yang berkaitan dengan pembahasan pergolakan PRRI. Data/sumber secara lisan, bisa penulis dapatkan melalui wawancara dengan veteran, mantan tentara PRRI, tentara yang mendukung pemerintahan pusat dan masyarakat yang hidup pada masa pergolakan PRRI. Tahap *kedua*, kritik sumber merupakan tahap pengujian sumber sejarah yang sudah bisa diketahui kebenarannya. Kritik sumber terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern (Kuntowijoyo, hlm. 101-102). Tahap *ketiga*, interpretasi ialah tahap untuk menafsirkan dan menganalisis fakta sejarah yang telah ditemukan melalui proses kritik sumber, sehingga akan terkumpul bagian-bagian yang akan menjadi fakta serumpun. Tahap *keempat*, Historiografi merupakan tahap kegiatan penulisan hasil penelitian sejarah secara deskriptif-analitis, berdasarkan sistematika dan kronologis (Pranoto, 2010. hlm.76).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Alam Nagari Anduriang

Nagari Anduriang adalah sebuah nagari terletak di bagian utara Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya saat ini penelitian dilaksanakan, Nagari Anduriang berada di kecamatan 2 X 11 Kayu tanam. Nama Nagari Anduriang menurut sejarahnya berasal dari sebuah nama pohon besar yang terletak di belakang surau kaum suku koto tepatnya di tepi Batang Anai, pohon besar tersebut bernama Anduriang. Kemudian pendapat lain menyebutkan bahwa nama Anduriang berasal dari kata *bairiang-iriang* (beriring-iringan), karena penduduk Nagari Anduriang ini berasal dari darek yang kemudian datang dan mendiami daerah ini secara *bairiang-irangan* (Marlis 2021). Pada masa pemerintahan Belanda Nagari Anduriang mengalami pemekaran dan di bentuklah sebuah nagari yang di beri nama Kayu Tanam, yang mana ini merupakan sebuah nama berdasarkan kesepakatan bersama ninik mamak Nagari Anduriang. Hal ini di sebabkan karena Kayu Tanam pada saat itu dijadikan pusat administrasi oleh pemerintahan Belanda. Yang dimaksud dengan 2 X 11 Kayutanam yaitu jumlah semua suku yang ada di empat nagari tersebut yang terdiri dari : 6 suku di Nagari Guguak, 5 suku di Nagari Kepala Hilalang, 6 suku di Sincin serta 5 suku di Nagari Anduriang dan Nagari Kayu Tanam. Sedangkan pada masa PRRI belum ada istilah kecamatan (Marlis 2021).

Secara geografis Nagari Anduriang berbatasan sebelah utara dengan Nagari Guguak, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Pasié Laweh, kecamatan Lubung Alung, sebelah timur berbatasan dengan Nagari Malalo kabupaten Tanah Datar dan sebelah barat berbatasan dengan Nagari Kayu Tanam, Nagari Sicincin dan Nagari Parit Malintang. Jarak Nagari Anduriang sangat dekat dengan daerah Padang Panjang yang merupakan jalan alternatif lain untuk menuju Bukittinggi dari Lembah Anai yang bisa ditempuh selain Kayu tanam. Jarak antara Nagari Anduriang dan Padang Panjang sangat dekat hanya dibatasi oleh ngarai dan lembah anai yang bisa ditempuh kurang lebih 30 menit. Nagari Anduriang adalah daerah yang beriklim tropis dengan suhu maksimum berkisar antara 21°C- 30°C dan hujan rata-rata 4837mm/th. Luas Nagari Anduriang adalah 133,85 Km² dengan ketinggian ±144 meter diatas permukaan laut (Data Statistik Kenagarian tahun 2020).

B. Nagari Anduriang pada Perang Saudara (PRRI)

Pada saat daerah-daerah yang lain di Sumatera Barat mulai berjatuh ke tangan pusat dan Nagari Anduriang masih terlihat normal, aktivitas masyarakat berjalan seperti biasanya. Namun keadaan Nagari Anduriang yang sekilas tampak normal ini, di luar sana ada bahaya dan konflik besar yang sedang mengancam. Bahaya dan konflik ini membuat kehidupan masyarakat Nagari Anduriang menjadi tidak kondusif, masyarakat mengalami ketakutan. Konflik secara etimologis merupakan suatu pertengkaran, perselisihan tentang pendapat atau keinginan, sedangkan secara sosiologi konflik ini adalah suatu pertentangan antara individu-individu ataupun kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat bahkan bisa juga antara bangsa-bangsa (Tualeka, 2017. hlm 33). Setelah Nagari Kayutanam berhasil diduduki oleh APRI tanggal 27 April 1958, kemudian APRI juga berlanjut menduduki daerah Nagari Anduriang. Kedatangan tentara APRI berhasil mendesak

pasukan dan simpatisan PRRI untuk menyingkir ke hutan, sehingga masyarakat Nagari Anduriang menyebut masa pergolakan PRRI sebagai “zaman lari ka dalam rimbo” (zaman lari ke dalam rimba).

Lokasi tempat untuk persembunyian dari pasukan dan simpatisan PRRI ini adalah hutan Sipisang, Sipinang dan Sikinjauah yang dijadikan sebagai basis gerilya. Nagari Anduriang dijadikan sebagai salah satu basis gerilya oleh pihak PRRI karena kondisi alamnya yang sangat strategis. Selain sebagai basis gerilya pada masa pergolakan Nagari Anduriang dan daerah sekitarnya cukup aman dari kepungan musuh, karena daerah ini agak sulit untuk direbut oleh tentara pusat pada saat penumpasan gerakan PRRI karena letak geografisnya dibatasi oleh bukit-bukit dan berngarai. Nagari Anduriang diapit oleh dua sungai yaitu Batang Anai dan Batang Pisang dengan kaki bukit pula sebagai salah satu sisinya. Semangat Dewan Banteng disambut sangat antusias oleh pemuda-pemuda Nagari Anduriang dengan bukti banyaknya pemuda Nagari Anduriang yang menjadi tentara sukarela PRRI setelah mendapat himbauan dari Ketua Dewan Banteng. Adapun ungkapan yang sering disampaikan kepada para pemuda-pemuda di Nagari Anduriang, seperti yang dikatakan oleh Datuak Garang Marlih: *“Ka jadi kudo baban pusat atau jadi kudo baban PRRI”*.

Tentara sukarela ini diandalkan oleh pihak PRRI sebagai tenaga bantuan, karena tentara reguler hanya beberapa orang. Para tentara sukarela ini dilatih dan dipersenjatai layaknya tentara reguler, tetapi ada juga sebagian masyarakat yang tidak mau bergabung menjadi prajurit sukarela PRRI dengan alasan tidak ingin mendapat masalah dikemudian harinya. Mereka inilah yang disebut dengan istilah “Baruek bamungko duo” di kalangan masyarakat Nagari Anduriang (Marlis 2021). Pasukan PRRI yang didominasi oleh pemuda-pemuda pelajar dan mahasiswa ini melarikan diri dan bersembunyi ke arah perbukitan untuk melakukan gerilya. Daerah yang dijadikan basis gerilya adalah daerah Sipisang, sipinang(Padang Ateh, Lubuak Katabuang), Kampuang Tengah (Rimbo Siguntang) dan Salodako. Selain membentuk pasukan sukarela, PRRI juga melakukan pungutan sukarela dari masyarakat. Pungutan sukarela ini tidak hanya berbentuk uang tetapi segala sesuatu yang bermanfaat bagi para pejuang PRRI. Hasil iuran sukarela ini digunakan dan disimpan sebagai cadangan logistik di saat kondisi dadurat.

Pungutan iuran ini dilakukan oleh wali nagari melalui penghulu dari masing-masing suku di Nagari Anduriang, karena pada saat terjadinya pergolakan wali nagari juga berperan sebagai wali yang bertugas membantu PRRI. Pada awalnya tidak ada patokan dan paksaan membayar iuran yang dilakukan oleh pasukan PRRI terhadap masyarakat. Namun di saat waktu yang mendesak dan kebutuhan logistik sudah hampir habis mereka melakukan pemaksaan terhadap penduduk untuk memberikan bahan makanan (Syafrizal, 2021). Masyarakat yang masih berada di Nagari Anduriang harus siap menghadapi kekuasaan yang sedang tidak kondusif antara prajurit-prajurit PRRI dan tentara pusat yang didukung oleh penduduk yang pro terhadap tentara pusat. Pemuda-pemuda yang bergabung dalam sebuah organisasi ini lebih dikenal dengan Organisasi Perlawanan Rakyat(OPR), pada saat itu yang menjadi komandan OPR di daerah Padang Pariaman adalah Bahar Kirai

dan merekalah yang bersama dengan masyarakat Nagari Anduriang yang pro tentara pusat. Puncak pergolakan PRRI terjadi di Anduriang Bawah, Kampuang Tengah. Tentara PRRI dan pasukan tentara pusat saling menyarang dan menembaki. Namun, pasukan PRRI kembali mundur kedalam hutan karena kalah peralatan perang dan terpaksa membiarkan Nagari Anduriang dikuasai oleh tentara pusat.

Selama terjadinya penumpasan gerakan PRRI, APRI berkuasa secara mutlak di Nagari Anduriang setelah pasukan PRRI dan masyarakat yang pro PRRI melarikan diri untuk melakukan perang gerilya. Pemberantasan PRRI yang dilakukan oleh tentara pusat membawa pengaruh yang sangat buruk dan kelam bagi kehidupan masyarakat Nagari Anduriang pada saat itu, banyak peristiwa kelam yang masih membekas dalam ingatan mereka, yaitu seperti pemerasan, penculikan, pemekosaan, peperangan antar saudara (Syafrizal, 2021). Pada saat itu sulit untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah karena yang dianggap benar pada saat itu adalah pemerintah dari kelompok yang berkuasa. Dalam situasi yang seperti ini banyak masyarakat yang menjadi korban, walaupun mereka tidak terlibat secara langsung. Untuk menyelamatkan diri masyarakat selalu mencari perlindungan kepada pihak-pihak yang berkuasa seperti, wali nagari yang menjabat pada saat itu (Syafrizal, 2021).

1. Kehidupan Sosial Masyarakat

Pada umumnya masyarakat Minangkabau ialah masyarakat yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Dalam sehari-harinya setiap pekerjaan dilakukan secara bergotong royong, masyarakat Minangkabau juga tidak mengenal yang namanya pembagian kelas dalam masyarakat, mereka hidup rukun. Semua harta kekayaan yang penting dimiliki bersama. Dalam mengambil suatu keputusan dan memecahkan suatu masalah di dalam masyarakat terlebih dahulu akan dilakukan dengan musyawarah dalam mencapai mufakat. Masyarakat Nagari Anduriang dipimpin oleh seorang penghulu. Setiap pekerjaan yang berat dilakukan secara bergotong royong seperti pembangunan rumah, memperbaiki jalan, dan mengolah sawah. Sebelum Nagari Anduriang dikuasai oleh APRI kehidupan sosial masyarakat sangat rukun, masyarakat saling mempercayai satu sama lain, hidup berdampingan tanpa saling mencurigai dan bergotong royong. Masyarakat Nagari Anduriang dengan senang hati menyambut masyarakat yang datang untuk mengungsi, bahkan mereka juga menyediakan rumah-rumah kosong untuk ditinggali. Selain menyediakan tempat tinggal, masyarakat juga memberikan bantuan lain kepada pengungsi yaitu berupa makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kehidupan sosial masyarakat Nagari Anduriang berubah secara drastis ketika Nagari Anduriang berhasil dikuasai oleh APRI. Masyarakat Nagari Anduriang merasa tidak nyaman, dilanda ketakutan dan dihantui oleh perang bahkan masyarakat sudah tidak percaya satu sama lain dan saling mencurigai (Marlis 2021). Dalam sehari-harinya gerak masyarakat sangat dibatasi, karena banyaknya posko-posko yang didirikan oleh APRI. Posko ini dibangun bertujuan untuk memeriksa setiap masyarakat yang akan pergi keluar atau masuk ke Nagari Anduriang oleh APRI dengan bantuan OPR. Untuk bisa keluar masuk Nagari Anduriang, masyarakat harus mempunyai kartu bebas APRI yang

ditandatangani oleh OPR. Peraturan seperti ini tidak hanya diberlakukan oleh APRI, PRRI yang masih menguasai beberapa daerah di Nagari Anduriang juga memberlakukan peraturan seperti itu juga, yaitu setiap masyarakat yang ingin masuk ke dalam Nagari Anduriang harus memiliki kartu PRRI, jika tidak ada mereka tidak akan diizinkan untuk masuk ke dalam nagari tersebut (Nuini, 2020).

2. Kehidupan Ekonomi Masyarakat

Sebagai masyarakat agraris, tidaklah mengherankan sumber utama ekonomi masyarakat Nagari Anduriang adalah bertani mengolah sawah dan berladang. Biasanya sawah yang dioalah merupakan sawah keluarga yang sudah turun temurun dan tentu saja kaum perempuanlah yang berhak mewarisi harta pusaka ini. Selain sawah, masyarakat juga membuat ladang atau kebun buah-buahan seperti durian, kelapa, karet dan lain-lainnya. Kehidupan ekonomi masyarakat Nagari Anduriang pada masa pergolakan PRRI sangat berbeda jauh ketika Anduriang masih dikuasai oleh PRRI dan ketika Anduriang dikuasai oleh APRI. Pada saat Nagari Anduriang dikuasai oleh PRRI masyarakat masih dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara membelinya di pasar.

Masyarakat mengolah sawah dan berladang padi untuk memenuhi kebutuhan pokok, dari sinilah penduduk mempunyai beras yang mana beras ini juga diberikan sebagian kepada tentara PRRI. Jika dibandingkan dengan keadaan ekonomi masyarakat sebelum terjadinya pergolakan PRRI, terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Sebelum pergolakan, pada umumnya masyarakat Nagari Anduriang memiliki perekonomian yang cukup bagus jika dibandingkan setelah terjadinya pergolakan. Saat pergolakan terjadi masyarakat mulai merasakan tidak nyaman dan dihantui oleh kegiatan perang sebab daerah ini merupakan daerah medan tempur yang menyebabkan masyarakat lari ke hutan dan ke luar dari Anduriang. Situasi yang seperti ini menyebabkan permasalahan ekonomi seperti pencurian binatang ternak, akibat dari pencurian ternak ini masyarakat banyak yang mengalami kerugian dan masyarakat takut untuk bekerja sehingga menyebabkan kesulitan ekonomi.

Ketika Nagari Anduriang dijadikan sebagai markas tentara PRRI dan tempat untuk pengungsian, masyarakat Nagari Anduriang mempunyai peranan untuk membantu tentara PRRI dan pengungsi memenuhi kebutuhan logistik mereka yaitu dengan cara melakukan iuran. Sebagian besar masyarakat Nagari Anduriang adalah petani, sebagian hasil kebun mereka disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan tentara PRRI dan masyarakat pengungsi. Bahkan ketika masyarakat memasak nasi mereka selalu melebihkan agak sedikit untuk diberikan kepada masyarakat pengungsi dan tentara PRRI, untuk memasak memenuhi kebutuhan logistik ini masyarakat melakukannya secara bergantian. Semua nasi yang sudah dimasak kemudian dibungkus kemudian dibawa ke posko-posko tentara PRRI, sedangkan untuk masyarakat pengungsi masyarakat setempat memberikan bantuan berupa nasi bungkus dan beras. Ketika Nagari Anduriang sudah dikuasai oleh APRI semua harga-harga kebutuhan pokok semakin tinggi karena disebabkan oleh banyaknya barang-barang yang disita oleh APRI dan OPR di tempat yang dijadikan sebagai posko-posko

pemeriksaan. Apabila barang yang dibawa melebihi dari yang sudah ditetapkan maka akan disita.

Kebutuhan pokok masyarakat yang biasanya dibeli dengan harga murah juga ikut mengalami kenaikan yang sangat tinggi karena permintaan masyarakat tidak sesuai dengan jumlah barang yang tersedia. Hal ini disebabkan karena pedagang-pedagang yang sebelumnya ikut meramaikan pasar sekarang sudah tidak lagi (Nur Jani 2021). Pada masa pergolakan PRRI pasar Kayutanam merupakan pasar yang sangat penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Nagari Kayu Tanam dan Nagari Anduriang sehingga ketika nagari dilanda perang saudara menyebabkan kemerosotan ekonomi yang sangat parah bagi masyarakat secara keseluruhan. APRI mendirikan posko pemeriksaan di daerah perbatasan antara Nagari Kayu Tanam dan Nagari Anduriang yaitu, di dekat jembatan Batang Anai. Dengan mendirikan posko di daerah perbatasan akan memudahkan APRI untuk mengawasi perdagangan masyarakat. Perekonomian masyarakat yang semakin sulit tentunya tidak terlepas dari politik Seokarno untuk memperlemah PRRI, yakni dengan dikeluarkannya kebijakan embargo ekonomi. Hubungan antara daerah dengan pusat putus sama sekali, sedangkan persediaan uang sudah habis. Sekarang tidak hanya kebutuhan yang langka, uang sebagai alat tukar untuk membelinya juga sudah tidak ada. Kebijakan embargo ekonomi mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia, yang menyebabkan barang-barang naik drastis dan persediaan uang sudah habis (Taufiqurahman, 2014. hlm 69).

Kebijakan embargo ekonomi yang dikeluarkan oleh Pemerintah ini memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap perjuangan PRRI di Sumatera Barat. Dengan diberlakukannya kebijakan ini masyarakat sudah tidak bisa lagi membantu kebutuhan logistik PRRI di dalam rimba karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masyarakat sudah kesusahan. Akibat dari kesulitan persediaan uang memaksa masyarakat baik masyarakat asli ataupun masyarakat yang mengungsi menggunakan sistem barter (Nur Jani 2021). Walaupun nantinya ada bantuan yang datang dari masyarakat jumlahnya tidak sebanyak ketika PRRI masih menguasai Nagari Anduriang. Setelah Nagari Anduriang di kuasai oleh APRI masyarakat bisa dikatakan hanya sesekali saja mengirimkan bantuan kepada tentara PRRI di hutan, bantuan yang dikirim itupun tidak dapat mencukupi semua kebutuhan tentara PRRI, namun tentara PRRI masih mendapatkan bantuan dari masyarakat Pati Kayu yang pada saat itu belum dikuasai oleh APRI.

3. Kehidupan Politik Masyarakat

Masyarakat Nagari Anduriang sama seperti daerah lain yang ada di Sumatera Barat, mayoritas masyarakat Nagari Anduriang adalah pendukung Partai Masyumi, pada tahun 1955 partai ini menang mutlak di nagari ini, di samping itu partai lain yang cukup berpengaruh adalah PKI, dan PSI. Kehidupan politik masyarakat Nagari Anduriang pada saat dikuasai oleh PRRI sangat berbeda jauh ketika dikuasai oleh APRI (Syafriani, 2014). Selama masa pergolakan daerah, kehidupan politik masyarakat Nagari Anduriang bisa dilihat dari keikutsertaan wali nagari dan golongan elit tradisional saat terjadi pergolakan. Jabatan wali nagari pada masa pergolakan biasanya dijabat oleh kalangan elit tradisional

yaitu golongan penghulu karena dalam status sosial mereka merupakan orang yang sangat disegani seperti ungkapan *didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang* (didahulukan selangkah, ditinggikan seranting). Apabila pemimpin berlaku sewenang-wenang atau tidak aspiratif, maka masyarakatnya boleh membantah dan menggantinya dengan pemimpin yang dianggap lebih baik (Munir, 2013).

Pada saat diumumkannya PRRI masyarakat Nagari Anduriang menyambut gerakan ini. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang dirasakan oleh Nagari Anduriang pada saat Dewan Banteng mengambil alih pemerintahan daerah Sumatera Tengah. Bahkan kaum penghulu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mempengaruhi masyarakat Nagari Anduriang (Marlis 2021). Nagari Anduriang pada masa PRRI dipimpin oleh seorang wali nagari yang bernama Wali Tanjo Ameh. Sebagai wali nagari ia sangat mendukung pembentukan PRRI oleh Ahmad Husein. Melalui kekuasaannya sebagai wali nagari Wali Tanjo Ameh terus mensosialisasikan tentang PRRI kepada masyarakat sehingga PRRI datang ke Nagari Anduriang masyarakat menyambut tentara PRRI dengan baik, bahkan Wali Tanjo Ameh juga ikut membantu kebutuhan logistik tentara PRRI selama berada di Anduriang. Setelah Nagari Anduriang dikuasai oleh APRI, kehidupan politik masyarakat berubah secara cepat. Yang mana pada awalnya para wali nagari adalah pendukung partai Masyumi, setelah APRI masuk kedaerah Anduriang bersamaan dengan tentara PRRI sehingga menyebabkan jabatan wali nagari kosong pada saat itu. Hal itulah yang menyebabkan berubahnya perpolitikan masyarakat Nagari Anduriang (Pakiah Basa 2021).

Kehidupan politik masyarakat Nagari Anduriang yang pada awalnya mayoritas pendukung Partai Masyumi mengalami perpecahan karena disebabkan oleh pengaruh dari propaganda yang dilakukan oleh PKI dan juga ancaman-ancaman yang diberikan oleh OPR terhadap penduduk. Namun, masih ada juga yang masih mendukung Masyumi secara diam-diam dan ada juga yang beralih mendukung PKI. Pada awal terjadinya pergolakan Nagari Anduriang dikuasai oleh PRRI, ketika PRRI berkuasa mayoritas masyarakat adalah pendukung Partai Masyumi. Namun ketika Nagari Anduriang dikuasai oleh tentara pusat/APRI yang di dalamnya banyak didukung oleh orang-orang PKI menyebabkan orang-orang yang beraliran Masyumi lari kegunung-gunung, kadang malam-malam mereka datang untuk mendapatkan makanan. Selama Nagari Anduriang dikuasai oleh APRI keamanan nagari menjadi rawan, masyarakat hidup dalam ketakutan. Para pemimpin lebih mengutamakan jabatan sebagai wali nagari pada masa itu. Masyarakat yang dicurigai didata dikantor wali nagari kemudian diserahkan kepada APRI dengan bantuan OPR nantinya masyarakat yang dicurigai akan ditangkap dan dipenjarakan, bahkan ada juga yang langsung dibunuh (Pakiah Basa 2021).

KESIMPULAN

Pada masa pergolakan PRRI, kehidupan masyarakat Nagari Anduriang tidak jauh berbeda dengan nagari-nagari lain yang ada di Sumatera Barat. Masyarakat hidup dalam suasana yang penuh dengan rasa takut, hidup tidak aman, bahkan masyarakat banyak yang lari ke rimba untuk bersembunyi. Kehidupan masyarakat Nagari Anduriang tampak sangat jelas berbeda ketika dikuasai oleh PRRI dan APRI baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik. Di bidang sosial masyarakat yang awalnya hidup sangat rukun, masyarakat saling mempercayai satu sama lain dan hidup berdampingan tanpa saling mencurigai, mulai saling tuduh menuduh dan mencurigai. Dibidang ekonomi, perekonomian masyarakat mulai mengalami kesusahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keadaan ekonomi yang semakin sulit tentunya tidak terlepas dari politik Soekarno untuk memperlemah PRRI, yakni dengan dikeluarkannya kebijakan embargo ekonomi. Kebijakan embargo ekonomi yang dikeluarkan oleh Soekarno ini memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap perjuangan PRRI di Sumatera Barat. Dengan diberlakukannya kebijakan ini masyarakat sudah tidak bisa lagi membantu kebutuhan logistik PRRI di dalam rimba karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masyarakat sudah kesusahan. Dibidang politik, masyarakat Nagari Anduriang yang pada awalnya mayoritas pendukung Partai Masyumi mengalami perpecahan karena disebabkan oleh pengaruh dari propaganda yang dilakukan oleh PKI dan juga ancaman-ancaman yang diberikan oleh OPR terhadap penduduk. Namun, masih ada juga yang masih mendukung Masyumi secara diam-diam dan ada juga yang beralih mendukung PKI.

DAFTAR PUSTAKA

- Gottschalk, L. (1975). *Mengerti Sejarah*. Jakarta : Yayasan Penerbit UI.
- Imaduddin, L., dkk.(2002). *Nagari Dialahkan Garudo-Pengalaman Pelaku Sejarah Dalam Kemelut PRRI 1958-1961*. Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Kuntowijoyo.(2001). *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta:Yayasan Benteng Budaya.
- Leirissa, R. Z (1991). *Permesta Membangunan Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Pustaka utama.
- Nuryanti, R. (2011). *Perempuan Berselimut Konflik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Pranoto, S. W. (2010). *Teori dan metodologi Sejarah*.Yogyakarta : Graha ilmu.
- Soekamto, S. (1985). *Kamus Sosiologi*. Jakarta. hlm 416.
- Taufiqurahman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara kepada Presiden Selaku Penyelenggaraan Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama(Pers).

Zed, M., Utama, E., & Chaniago, H. (1998). *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Data Statistik Kenagarian tahun 2020.

Munir, M. (2013). *Nilai-nilai Pendidikan dalam Petatah Petitih Adat Minangkabau*. Jurnal Al-Hurriyah, 14(1), 96-102.

Putra, O. W. (2019). *Nagari Matur pada masa PRRI (1958-1961)*. *Gelombang Sejarah*, 1(2), 237-249).

Tualeka, M. W. N. (2013). *Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modren*. Jurnal Al-Hikmah, 3(1), 32-48.

Zuraida, T. R., Sumartini., Qomariya, U. (2013). *Pemberontakan Perempuan Dalam Novel Perempuan Badai Karya Mustofa Wahid Hasyim : Kajian Feminisme*. Jurnal Sastra Indonesia 2(1), 1-10.

Hastuti. H. (2010). *Nagari Paninggahan pada masa PRRI (1958-1961)*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.

Syafriani. P. (2014). *Nagari Kayutanam pada masa PRRI (1958-1961)*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.